



SALINAN

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2025, sinkronisasi proyek atau program sesuai dengan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dan sinkronisasi proyek atau program di bidang energi, pangan, dan air untuk mendukung target swasembada pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, perlu dilakukan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
6. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 339);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 113);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 683);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 923);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL.

Pasal I

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian:

- a. Nomor 9 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 688);
- b. Nomor 21 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1260);
- c. Nomor 7 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 675);
- d. Nomor 8 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 904);
- e. Nomor 6 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 257);
- f. Nomor 12 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 683);
- g. Nomor 2 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 154),

diubah sebagai berikut:

1. Setelah ayat (2) Pasal 2A ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Setiap penanggung jawab Proyek Strategis Nasional harus menyelesaikan Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator ini secara tepat waktu sesuai dengan dokumen perencanaan yang disampaikan pada saat pengusulan Proyek Strategis Nasional.
- (2) Dalam hal Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan tepat waktu, penanggung jawab Proyek Strategis Nasional melaporkan pelaksanaan dan usulan revisi rencana penyelesaian kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

- (3) Laporan pelaksanaan dan usulan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan kewenangannya.
2. Di antara Pasal 2A dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2B

Dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A, sinkronisasi dan pengendalian Proyek Strategis Nasional dikoordinasikan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan kewenangannya.

3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 717



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

I Ketut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN DAFTAR PROYEK
STRATEGIS NASIONAL

PERUBAHAN DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL

I. PROYEK

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
A. Sektor Jalan dan Jembatan		
1.	Jalan Tol Serang - Panimbang	Provinsi Banten
2.	Jalan Tol Pandaan - Malang	Provinsi Jawa Timur
3.	Jalan Tol Manado - Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
4.	Jalan Tol Balikpapan - Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur
5.	Jalan Tol Medan - Binjai - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
6.	Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Riau
7.	Jalan Tol Kisaran - Tebing Tinggi - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
8.	Jalan Tol Sigli - Banda Aceh - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Aceh
9.	Jalan Tol Binjai - Langsa - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Aceh dan Sumatera Utara
10.	Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Barat
11.	Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau
12.	Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Utara
13.	Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan
14.	Jalan Tol Jambi - Rengat - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Jambi dan Riau

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
15.	Jalan Tol Rengat - Pekanbaru - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Riau
16.	Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan
17.	Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu - bagian dari Trans Sumatera	Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
18.	Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung	Provinsi Sumatera Selatan
19.	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan	Provinsi Jawa Barat
20.	Jalan Tol Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Padalarang	Provinsi Jawa Barat
21.	Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten
22.	Jalan Tol Serpong - Cinere	Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat
23.	Jalan Tol Cinere - Jagorawi	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
24.	Jalan Tol Cimanggis - Cibitung	Provinsi Jawa Barat
25.	Jalan Tol Cibitung - Cilincing	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
26.	Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
27.	Jalan Tol Serpong - Balaraja	Provinsi Banten
28.	Jalan Tol Semanan - Sunter - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
29.	Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
30.	Jalan Tol Duri Pulo - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
31.	Jalan Tol Kemayoran - Kampung Melayu - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
32.	Jalan Tol Ulujami - Tanah Abang - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
33.	Jalan Tol Pasar Minggu - Casablanca - bagian dari 6 ruas tol Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
34.	Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo	Provinsi Jawa Timur
35.	Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi	Provinsi Jawa Timur
36.	Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar	Provinsi Jawa Timur

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
37.	Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Sisi Selatan	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
38.	Jalan Tol Semarang - Demak	Provinsi Jawa Tengah
39.	Jalan Tol Yogyakarta - Bawen	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah
40.	Pembangunan <i>Fly Over</i> dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong	Provinsi Jawa Timur
41.	Jalan Tol Ngawi - Kertosono - Kediri	Provinsi Jawa Timur
42.	Jalan Tol Depok - Antasari (termasuk Bojonggede - Salabenda)	Provinsi Jawa Barat
43.	Jalan Tol Solo - Yogyakarta - Kulon Progo	Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
44.	Jalan Tol Bogor <i>Ring Road</i> (termasuk Caringin - Salabenda)	Provinsi Jawa Barat
45.	Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap	Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah
46.	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Provinsi Jawa Barat
47.	Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk - Negara - Pekutatan - Soka - Mengwi	Provinsi Bali
48.	Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/ <i>New Priok Eastern Access</i> (NPEA)	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
49.	Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. <i>Section Harbour Road II</i> (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur - Pluit (<i>Elevated</i>))	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
50.	Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: a. <i>North - South Link</i> Bandung; dan b. <i>Bandung Inter Urban Toll Road</i>	Provinsi Jawa Barat
B. Sektor Pelabuhan		
51.	Pelabuhan KEK Maloy	Provinsi Kalimantan Timur
52.	Pelabuhan Sanur - Nusa Ceningan/Lembongan	Provinsi Bali
53.	Pelabuhan Likupang	Provinsi Sulawesi Utara
54.	Makassar <i>New Port</i>	Provinsi Sulawesi Selatan
55.	Terminal <i>Multipurpose</i> Labuan Bajo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
56.	Pembangunan Pelabuhan Patimban	Provinsi Jawa Barat
57.	Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing	Provinsi Kalimantan Barat

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
58.	Pengembangan Pelabuhan Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
59.	Pengembangan Pelabuhan Sorong	Provinsi Papua Barat Daya
60.	Pengembangan Pelabuhan Teluk Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
61.	Pengembangan Pelabuhan <i>Hub</i> Internasional Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
62.	Pengembangan Pelabuhan <i>Hub</i> Internasional Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
63.	Pengembangan Pelabuhan Benoa (<i>Bali Maritime Tourism Hub</i>)	Provinsi Bali
64.	Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/ <i>New Palembang</i>	Provinsi Sumatera Selatan
65.	Pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi	Provinsi Jambi
C. Sektor Bandar Udara		
66.	Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
67.	Bandar Udara Kediri	Provinsi Jawa Timur
68.	Bandar Udara Komodo - Labuan Bajo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
69.	Pengembangan Bandar Udara Internasional Lombok Praya	Provinsi Nusa Tenggara Barat
70.	Pembangunan Bandar Udara Nabire Baru	Provinsi Papua Tengah
71.	Pembangunan Bandar Udara Siboru Fak Fak	Provinsi Papua Barat
72.	Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun	Provinsi Kepulauan Riau
D. Sektor Kereta		
73.	Kereta Api Makassar - Parepare (Tahap I dari Pengembangan Jalur Lintas Barat Sulawesi Bagian Selatan)	Provinsi Sulawesi Selatan
74.	Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung (mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)	Provinsi Sumatera Utara
75.	Kereta Api Rantau Prapat - Kota Pinang	Provinsi Sumatera Utara
76.	Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
77.	<i>Double Track</i> Jawa Selatan	Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
78.	<i>High Speed Railway</i> Jakarta - Bandung	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
79.	Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
80.	Kereta Api Logistik Lahat - Kertapati	Provinsi Sumatera Selatan
81.	Infrastruktur Kereta Api Logistik di Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur
82.	<i>Light Rail Transit</i> (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang)	Provinsi Sumatera Selatan
83.	<i>Light Rail Transit</i> (LRT) Jakarta Segmen Velodrome - Manggarai	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
84.	Jakarta <i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) <i>North - South</i> (Bundaran HI - Kota - Ancol Barat)	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
85.	<i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) Jakarta <i>East - West Phase I</i>	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat
E. Sektor Kawasan		
86.	Kawasan Industri Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
87.	Kawasan Industri Landak	Provinsi Kalimantan Barat
88.	Kawasan Industri Ketapang	Provinsi Kalimantan Barat
89.	Kawasan Industri Jorong	Provinsi Kalimantan Selatan
90.	Kawasan Industri Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan
91.	Kawasan Industri Morowali	Provinsi Sulawesi Tengah
92.	Kawasan Industri Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara
93.	Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni	Provinsi Papua Barat
94.	Kawasan Industri Tanah Kuning	Provinsi Kalimantan Utara
95.	Kawasan Industri Wilmar Serang	Provinsi Banten
96.	Kawasan Industri Pulau Obi	Provinsi Maluku Utara
97.	Kawasan Industri Weda Bay	Provinsi Maluku Utara

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
98.	Kawasan Industri Takalar	Provinsi Sulawesi Selatan
99.	Kawasan Industri Tanjung Enim	Provinsi Sumatera Selatan
100.	Kawasan Terintegrasi Merak - Bakauheni	Provinsi Banten dan Provinsi Lampung
101.	Kawasan Industri Terpadu Batang	Provinsi Jawa Tengah
102.	Kawasan Industri Indonesia Konawe <i>Industrial Park</i> (IKIP)	Provinsi Sulawesi Tenggara
103.	Kawasan Industri Tanjung Sauh	Provinsi Kepulauan Riau
104.	Kawasan Industri Indonesia Pomalaa <i>Industry Park</i>	Provinsi Sulawesi Tenggara
105.	Kawasan Industri Motui	Provinsi Sulawesi Tenggara
106.	Kawasan Industri Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara
107.	Kawasan Industri Pulau Ladi	Provinsi Kepulauan Riau
108.	Kawasan Industri Pupuk Fakfak	Provinsi Papua Barat
109.	Kawasan Industri Indonesia Huabao <i>Industrial Park</i>	Provinsi Sulawesi Tengah
110.	Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing <i>Industry Park</i> (IDIP)	Provinsi Sulawesi Tengah
111.	Kawasan Industri Indonesia Huali <i>Industry Park</i> (IHIP)	Provinsi Sulawesi Selatan
112.	Dihapus	Dihapus
113.	Kawasan Industri Wiraraja <i>Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park</i> (GESEIP)	Provinsi Kepulauan Riau
114.	Kawasan Industri Neo Energy Parimo <i>Industrial Estate</i> (NEPIE)	Provinsi Sulawesi Tengah
115.	Kawasan Industri Patimban <i>Industrial Estate</i>	Provinsi Jawa Barat
116.	Kawasan Industri Indonesia Giga <i>Industry Park</i> (IGIP)	Provinsi Sulawesi Tenggara
117.	Kawasan Industri Kolaka <i>Resources Industrial Park</i> (KRIP)	Provinsi Sulawesi Tenggara
118.	Kawasan Industri ASPIRE <i>Stargate</i> (ASPR)	Provinsi Sulawesi Tenggara
119.	Kawasan Industri Neo Energy Morowali <i>Industrial Estate</i> (NEMIE)	Provinsi Sulawesi Tengah
120.	Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto, dan Kampung Masiran	Provinsi Kepulauan Riau
121.	Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya <i>Waterfront Land</i> (SWL)	Provinsi Jawa Timur

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
122.	Kawasan Pengembangan Terpadu Bumi Serpong Damai (Kawasan Khusus Pendidikan, Riset, Ekonomi Digital, dan Pengembangan Teknologi, Industri Kreatif, Kesehatan dan <i>Biomedical</i> Terpadu)	Provinsi Banten
123.	Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara (KITHK)	Provinsi Sulawesi Tenggara
124.	Kawasan Industri Hijau Futong	Provinsi Riau
125.	Kawasan Industri Pulau Penebang	Provinsi Kalimantan Barat
126.	Kawasan Industri Kumai Multi Energi	Provinsi Kalimantan Tengah
127.	Kawasan Industri Alumina Toba	Provinsi Kalimantan Barat
128.	Kawasan Industri Indo Mineral Mining	Provinsi Sulawesi Tengah
129.	Kawasan Industri Sungai Tabuk	Provinsi Kalimantan Tengah
130.	Kawasan Industri Rimau	Provinsi Kalimantan Tengah
F. Sektor Perumahan		
131.	Pembangunan Rumah Susun	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
132.	Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya	Nasional
G. Sektor Bendungan dan Irigasi		
133.	Bendungan Marangkayu	Provinsi Kalimantan Timur
134.	Bendungan Kuningan	Provinsi Jawa Barat
135.	Bendungan Bendo	Provinsi Jawa Timur
136.	Bendungan Gongseng	Provinsi Jawa Timur
137.	Bendungan Tukul	Provinsi Jawa Timur
138.	Bendungan Pidekso	Provinsi Jawa Tengah
139.	Bendungan Tugu	Provinsi Jawa Timur
140.	Bendungan Karalloe	Provinsi Sulawesi Selatan
141.	Bendungan Keureuto	Provinsi Aceh
142.	Bendungan Tapin	Provinsi Kalimantan Selatan
143.	Bendungan Passeloreng	Provinsi Sulawesi Selatan
144.	Bendungan Lolak	Provinsi Sulawesi Utara

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
145.	Bendungan Bintang Bano	Provinsi Nusa Tenggara Barat
146.	Bendungan Karian	Provinsi Banten
147.	Bendungan Rukoh dan Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh	Provinsi Aceh
148.	Bendungan Way Sekampung	Provinsi Lampung
149.	Bendungan Kuwil Kawangkoan	Provinsi Sulawesi Utara
150.	Bendungan Ladongi	Provinsi Sulawesi Tenggara
151.	Bendungan Ciawi	Provinsi Jawa Barat
152.	Bendungan Sukamahi	Provinsi Jawa Barat
153.	Bendungan Leuwikeris	Provinsi Jawa Barat
154.	Bendungan Cipanas	Provinsi Jawa Barat
155.	Bendungan Tiga Dihaji	Provinsi Sumatera Selatan
156.	Bendungan Semantok	Provinsi Jawa Timur
157.	Bendungan Pamukkulu	Provinsi Sulawesi Selatan
158.	Bendungan Bener	Provinsi Jawa Tengah
159.	Bendungan Sadawarna	Provinsi Jawa Barat
160.	Bendungan Lausimeme	Provinsi Sumatera Utara
161.	Bendungan Sidan	Provinsi Bali
162.	Bendungan Marga Tiga	Provinsi Lampung
163.	Bendungan Bagong	Provinsi Jawa Timur
164.	Bendungan Randugunting	Provinsi Jawa Tengah
165.	Bendungan Mbay	Provinsi Nusa Tenggara Timur
166.	Bendungan Bulango Ulu	Provinsi Gorontalo
167.	Bendungan Napun Gete	Provinsi Nusa Tenggara Timur
168.	Bendungan Temef	Provinsi Nusa Tenggara Timur
169.	Bendungan Way Apu	Provinsi Maluku
170.	Bendungan Meninting	Provinsi Nusa Tenggara Barat
171.	Bendungan Tamblang	Provinsi Bali
172.	Bendungan Beringin Sila	Provinsi Nusa Tenggara Barat
173.	Bendungan Tiu Suntuk	Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
174.	Bendungan Manikin	Provinsi Nusa Tenggara Timur
175.	Bendungan Jlantah	Provinsi Jawa Tengah
176.	Bendungan Jragung	Provinsi Jawa Tengah
177.	Bendungan Sepaku Semoi	Provinsi Kalimantan Timur
178.	Bendungan Budong-Budong	Provinsi Sulawesi Barat
179.	Bendungan Ameroro	Provinsi Sulawesi Tenggara
180.	Bendungan Karangnongko	Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur
181.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci	Provinsi Aceh
182.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan	Provinsi Aceh
183.	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang	Provinsi Sumatera Selatan
184.	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Baliase	Provinsi Sulawesi Selatan
185.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Gumbasa	Provinsi Sulawesi Tengah
186.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang	Provinsi Jawa Barat
187.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Glapan	Provinsi Jawa Tengah
188.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Komering	Provinsi Sumatera Selatan
189.	Pembangunan dan Pengelolaan <i>Estuary Dam</i> di Teluk Bintan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Provinsi Kepulauan Riau
H. Sektor Air Bersih dan Sanitasi		
190.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat	Provinsi Jawa Tengah
191.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan	Provinsi Jawa Timur
192.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung
193.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur	Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
194.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Wosusokas	Provinsi Jawa Tengah
195.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian - Serpong	Provinsi Banten dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
196.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng - Kobema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma)	Provinsi Bengkulu
197.	Sarana dan Prasarana Air Baku Karian	Provinsi Banten
198.	Jakarta <i>Sewerage System</i> (JSS)	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
I. Sektor Tanggul Pantai		
199.	Tanggul Pantai	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten
J. Sektor Energi		
200.	Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela	Provinsi Maluku
201.	Pengembangan Lapangan Gendalo, Gandang, Gehem, dan Bangka (Indonesia <i>Deepwater Development Project/IDD</i>)	Provinsi Kalimantan Timur
202.	Proyek Tangguh LNG <i>Train 3</i>	Provinsi Papua Barat
203.	Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru	Provinsi Jawa Timur
204.	Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan <i>Compresion (UCC Project)</i> di Teluk Bintuni	Provinsi Papua Barat
205.	Pengembangan Lapangan Gas Asap, Kido, dan Merah (AKM)	Provinsi Papua Barat
206.	Kilang Minyak Tuban (Ekspansi)	Provinsi Jawa Timur
207.	<i>Upgrading</i> Kilang-Kilang Eksisting/ <i>Refinery Development Master Plan</i> (RDMP)	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Selatan
208.	<i>Upgrading</i> Kilang Eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan	Provinsi Jawa Barat
209.	Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM	Indonesia Bagian Timur
210.	Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG	Indonesia Bagian Timur
211.	Pembangunan Jaringan Gas Kota	Nasional
212.	Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Cirebon - Semarang (Tahap I Ruas Semarang - Batang dan Tahap II Ruas Batang - Indramayu) serta Ruas Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei - Dumai	Provinsi Jawa Barat - Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Utara - Provinsi Riau
213.	Pembangunan Bahan Bakar Hijau (<i>Green Refinery</i> RU IV Cilacap, Hidrogenasi CPO RU IV Cilacap, <i>Green Refinery</i> RU III Plaju, Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek)	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Barat

NO.	DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
214.	Pengembangan <i>Biofuel</i> dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro	Provinsi Jawa Timur
215.	Gasifikasi Batubara di Tanjung Enim	Provinsi Sumatera Selatan
216.	Gasifikasi Batubara di Kutai Timur	Provinsi Kalimantan Timur
217.	<i>North Hub Development Project</i> Selat Makassar	Provinsi Kalimantan Timur
K. Sektor Teknologi		
218.	Percepatan Pembangunan <i>Technopark</i>	Nasional
219.	Proyek Satelit Multifungsi	Nasional
220.	Pengembangan <i>Drone Male</i> Kombatn (<i>Male Unmanned Combat Aerial Vehicle</i>)	Nasional
221.	Pengembangan Teknologi Produksi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih yang Terintegrasi dengan Kebun Rakyat	Nasional
222.	Pengembangan Industri Garam	Nasional
223.	Palapa Ring Integrasi	Nasional
L. Sektor Pendidikan		
224.	Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia	Provinsi Jawa Barat
M. Sektor Pariwisata		
225.	Proyek Pariwisata Seribu Pulau di Kepulauan Seribu	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
226.	Dihapus	Dihapus
N. Sektor Pertanian dan Perkebunan		
227.	Pembangunan Kelapa Dalam dan Industri Turunannya	Provinsi Papua Barat Daya
228.	Pengembangan Lahan Sawah Rawa Pasang Surut Tanah Mineral dan Rawa Lebak Tanah Mineral	Provinsi Sumatera Selatan

II. PROGRAM

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
1.	Program Ketenagalistrikan	Program Ketenagalistrikan terdiri dari: a. Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) (daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan); b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Nasional; c. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Skala Besar di Kepulauan Riau; dan d. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air Sungai Mentarang di Kalimantan Utara.
2.	Program Pemerataan Ekonomi	Percepatan Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Perhutanan Sosial, Reforma Agraria, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Peremajaan Kebun Rakyat, dan Lahan Pertanian bagi Masyarakat Korban Konflik di Provinsi Aceh.
3.	Program Pengembangan Kawasan Perbatasan	10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Jalan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Paralel Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara dan Jalan Akses Perbatasan Kalimantan Utara.
4.	Program Pengembangan Jalan Akses <i>Exit Toll</i>	58 lokasi <i>Exit Toll</i> pada 10 Provinsi.
5.	Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Fokus lokasi di DPSP Danau Toba, DPSP Borobudur, DPSP Mandalika, DPSP Labuan Bajo, dan DPSP Likupang.
6.	Dihapus	Dihapus
7.	Program Pembangunan <i>Smelter</i>	Program Pembangunan <i>Smelter</i> terdiri dari: a. Pembangunan 8 (delapan) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel oleh: 1) PT Artabumi Sentra Industri di Morowali, Sulawesi Tengah; 2) PT Wanxiang Nickel Indonesia di Morowali, Sulawesi Tengah;

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
		3) PT Artha Mining Industry di Bombana, Sulawesi Tenggara; 4) PT Ceria Nugraha Indotama di Kolaka, Sulawesi Tenggara; 5) PT Macika Mineral Industri di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara; 6) PT Virtue Dragon Nickel Industry di Konawe, Sulawesi Tenggara; 7) PT Aneka Tambang P3FH di Halmahera Timur, Maluku Utara; dan 8) PT Aneka Tambang Niterra Haltim di Halmahera Timur, Maluku Utara. b. Pembangunan 3 (tiga) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Bauksit oleh: 1) PT Dinamika Sejahtera Mandiri di Sanggau, Kalimantan Barat; 2) PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (ekspansi) di Ketapang, Kalimantan Barat; dan 3) PT Tianshan Alumina Indonesia di Lingga, Kepulauan Riau. c. Pembangunan 2 (dua) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Tembaga oleh: 1) PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur; dan 2) PT Amman Mineral Industri di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. d. Pembangunan 1 (satu) Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Pasir Besi dan Vanadium oleh PT Alchemist Metal Industry di Halmahera Utara, Maluku Utara. e. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel Terintegrasi dengan Penambangan: 1) Smelter PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia dan Tambang PT Vale Indonesia Blok Bahodopi di Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; dan

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
		2) Smelter PT Kolaka Nikel Indonesia dan Tambang PT Vale Indonesia Blok Pomala di Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. f. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Komoditas Nikel Terintegrasi dengan Penambangan serta Kawasan Industri dalam rangka Pengembangan EV Battery Nasional PT Aneka Tambang Group, PT Industri Baterai Indonesia, serta mitranya di Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. g. Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Alumina Terpadu: 1) Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Bauksit oleh PT Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat Fase I; dan 2) Pembangunan Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Bauksit oleh PT Indonesia Asahan Aluminium/Induk PT Borneo Alumina Indonesia serta mitranya di Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat Fase II yang terintegrasi dengan pembangunan smelter kedua oleh PT Indonesia Asahan Aluminium serta mitranya di Kuala Tanjung, Provinsi Sumatera Utara.
8.	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional dalam rangka Mendukung Ketahanan Pangan.
9.	Program Pengembangan <i>Superhub</i>	Bali - Nusa Tenggara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Integrasi PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, dan PT Pelindo IV ke dalam PT Pelindo II.

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
10.	Program Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan dan Peraturan mengenai Ibu Kota Negara	Program terdiri dari: - Percepatan Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara dan Infrastruktur Pendukung Ibu Kota Negara yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara beserta perubahannya; - Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang; - Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan; - Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun; - Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan; dan - Percepatan Pengembangan Wilayah Lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.	Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus	Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan oleh Presiden.
12.	Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit	Integrasi Grup PT Perkebunan Nusantara melalui pembentukan SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo.
13.	Program Pengembangan Kawasan <i>Eco-City</i>	Pengembangan Kawasan Rempang <i>Eco-City</i> di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan <i>masterplan</i> .

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
14.	Program Pertumbuhan Industri Pariwisata dan Penerbangan	Peningkatan Konektivitas Udara dalam rangka Pertumbuhan Industri Pariwisata dan Penerbangan.
15.	Program Pengoperasian dan Modernisasi Jalan Tol	Penerapan <i>Multi-Lane Free Flow</i> (MLFF) untuk Pengoperasian dan Modernisasi Jalan Tol.
16.	Program Pengendalian Banjir, Penanganan Kemacetan, dan Peningkatan Kelayakhunian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Program Pengendalian Banjir, Penanganan Kemacetan, dan Peningkatan Kelayakhunian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri dari: a. Pembangunan Simpang Tidak Sebidang; b. Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir; c. Pengembangan Infrastruktur Transportasi; dan d. Pengembangan Fasilitas Pengolahan Sampah Terpadu.
17.	Program Makan Bergizi Gratis	Nasional.
18.	Program Sekolah Rakyat	Nasional.
19.	Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Nasional.
20.	Program Digitalisasi Pendidikan	Nasional.
21.	Program Pengentasan Kemiskinan	Nasional.
22.	Program Pengelolaan Sampah Terpadu	Daftar proyek berpedoman pada Peraturan Presiden.
23.	Program Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel (termasuk antara lain pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) berupa Cetak Sawah, Pengembangan Sawit, dan Pengembangan Peternakan, serta sarana pendukung lainnya)	Provinsi Papua Selatan.
24.	Program Revitalisasi Tambak Pantura di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Indramayu	Provinsi Jawa Barat.

NO.	DAFTAR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	KETERANGAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
25.	Program Pengembangan Budi Daya Udang Terintegrasi (<i>Integrated Shrimp Farming</i>) di Kabupaten Sumba Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ketut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002